

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Negara Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Rekening Daerah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Fandhuta Dhafa Alayubi¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Rizka Komariah²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Rindang Susanto³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

JOURNAL OF
INTERDISCIPLINARY
SCIENCE AND EDUCATION
©The Author(s) 2023

Corresponding Author: Fandhuta Dhafa Alayubi
E-mail: fandhuta.dhafa@sties-alifa.ac.id

Abstract:

Financial reports of exceptional quality at the Regional Office of the Ministry of Religion in Lampung Province (Kanwil Kemenag Lampung) demonstrate the accountability and effectiveness of regional managers. These reports showcase their commitment to responsible resource management and demonstrate their responsiveness to financial accountability. This study, conducted from March to April 2022, employed a combination of questionnaires and face-to-face interviews with key stakeholders to gather primary data. The research concludes that implementing government accounting standards within Kanwil Kemenag Lampung has yielded highly beneficial results. The quality of financial reporting has been significantly elevated, indicating responsible stewardship of public resources. This analysis, utilizing simple linear regression conducted through SPSS, further reveals a strong positive correlation between the effectiveness of applying government accounting standards and the overall quality of government financial reporting. The study's sample included 30 employees from the regional office's finance department and 10 additional multipliers. Statistical tests, including a T-test, revealed significant differences in the effectiveness of implementing government accounting standards. The T-statistic of 33.968, with a p-value of 0.021 (significantly lower than the 0.05 threshold), confirms a statistically significant impact. Additionally, the regression coefficient of 0.930 underscores a strong positive correlation between the two variables. In essence, this research highlights the positive impact of implementing government accounting standards on the financial reporting quality and accountability of regional offices. By ensuring responsible resource management and effective financial reporting practices, Kanwil Kemenag Lampung exemplifies a model for other regional offices to emulate.

Keywords: *Accounting Standards; Financial Reporting; Financial Management.*

Pendahuluan

Sesuai dengan persyaratan transparansi dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan otonomi wilayah pengelolaan perekonomian daerah, maka instansi pemerintah wajib mengelola perekonomian dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perekonomiannya sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya. ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah perlu memiliki sistem pelaporan keuangan yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diukur. Sistem ini harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Inovasi dan pengembangan di bidang akuntansi tata kelola yang berkelanjutan diperlukan untuk membentuk sistem yang sesuai. Reformasi yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional dan daerah, termasuk desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah.

Dalam rangka mendukung desentralisasi pengelolaan keuangan dan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pengelolaan keuangan nasional, yang meliputi Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Survei Pengelolaan dan Akuntabilitas Nomor 15 Tahun 2004. Undang-Undang Perimbangan Perekonomian Pusat dan Daerah Nomor 33 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tahun 2004 yang mengharuskan penguatan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi nasional. Berbagai peraturan dan ketetapan pengelolaan keuangan telah disiapkan yang menjadi landasan kuat bagi pengelola keuangan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bersih.

Pelaporan keuangan publik adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka konseptual Akuntansi Manajemen (Bagian 9) menjelaskan bahwa pelaporan keuangan dewan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Informasi tersebut mencakup kondisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas, dan hasil keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Informasi dalam laporan keuangan publik memiliki nilai signifikan jika memenuhi empat kriteria, yaitu nilai umpan balik, nilai prediktif, ketepatan waktu, dan kelengkapan.

Laporan keuangan yang berkualitas tinggi merupakan indikator penting kinerja manajer regional. Kualitas laporan keuangan yang tinggi menunjukkan bahwa manajer regional telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan sesuai dengan kewenangan yang

diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik dan terkait dikelola secara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Negara terhadap kualitas pelaporan keuangan pada Rekening Daerah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui distribusi kuesioner dan wawancara tatap muka dengan pihak terkait di kantor regional Kementerian Agama Provinsi Lampung selama periode penelitian Maret-April 2022. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Penelitian ini mengandalkan data primer yang dikumpulkan dari responden yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis dilakukan menggunakan alat statistik untuk mengukur pengaruh implementasi Standar Akuntansi Negara terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Negara dan kualitas pelaporan keuangan di Kantor Regional Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Hasil dan Diskusi

Sistem akuntansi keuangan publik yang digunakan di Kanwil Kemenag Sulse adalah akuntansi publik berbasis akrual (PMK 270/PMK 05/2014), yang mencerminkan pengeluaran dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran sesuai kriteria yang telah ditentukan. dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang sistematis dan komprehensif yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebuah perusahaan yang sudah lama menjalankan bisnisnya. Tujuan laporan keuangan publik adalah untuk: Ini melayani tujuan umum pelaporan keuangan tetapi tidak memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Laporan keuangan dapat diartikan sebagai sekumpulan dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan karena memberikan penjelasan dan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Instansi pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan formal yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut harus mencakup laporan neraca, laporan pelaksanaan anggaran, laporan arus kas, dan laporan keuangan eksternal. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi

keuangan, pelaksanaan anggaran, kelebihan saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan kesopanan.

Tinjau keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan, serta untuk memastikan akuntabilitas publik. Untuk mendukung penerapan desentralisasi akuntansi, Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi terintegrasi dalam administrasi publik, yang tersedia bagi kementerian negara atau lembaga. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penggunaan standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah tercapai. Tujuan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan pelaporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBN, pemerintah menerapkan sistem aplikasi terintegrasi SAP berbasis kinerja. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan APBN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan APBN.

Penggunaan sistem aplikasi BUN terintegrasi diterapkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Kementerian Keuangan dan sistem anggaran, penggunaan sistem penerapan terpadu kementerian atau lembaga dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri tersendiri.

Keuangan. Kementerian atau lembaga diberi tugas oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangannya dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang bersumber dari Departemen Bantuan Anggaran Perbendaharaan Negara atau Departemen Anggaran Belanja Lainnya Perbendaharaan Negara.

Uji Validitas.

Variabel	Indikator	Nilai	Ket.	Variabel	Indikator	Nilai	Ket.
X	Penerapan SAP			Y	Kualitas Laporan Keuangan		
	X ₁	*,613	Valid		Y1	*,819	Valid
	X ₂	*,410	Valid		Y2	*,664	Valid
	X ₃	*,454	Valid		Y3	*,156	Tidak valid
	X ₄	*,482	Valid		Y4	*,509	Valid
	X ₅	*,769	Valid		Y5	*,607	Valid
	X ₆	*,620	Valid		Y6	*,619	Valid
	X ₇	*,189	Tidak Valid		Y7	*,424	Valid
	X ₈	*,475	Valid		Y8	*,451	Valid
	X ₉	*,604	Valid		Y9	*,432	Valid
	X ₁₀	*,672	Valid		Y10	*,819	Valid

Berdasarkan hasil analisis korelasi, dapat disimpulkan bahwa variabel X, pertanyaan nomor 1-10 memiliki korelasi yang kuat dengan variabel Y. Korelasi tersebut ditunjukkan oleh nilai rhitung yang lebih besar dari 0,3. Namun, pertanyaan nomor 3 memiliki korelasi yang lemah dengan variabel Y, ditunjukkan oleh nilai rhitung yang lebih kecil dari 0,3. Oleh karena itu, pertanyaan nomor 3 dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

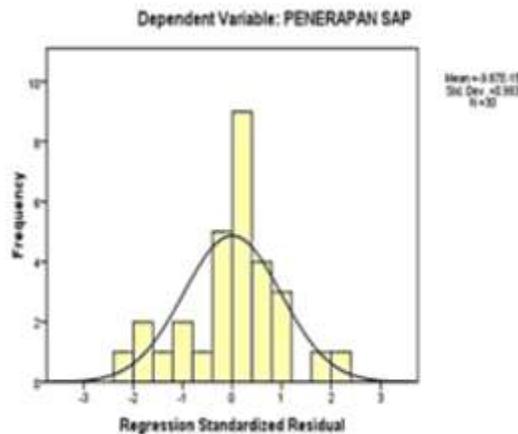
Varabel	Alpha	Ket.
X	*,730	Reliabel
Y	*,742	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai alpha variabel implementasi SAP sebesar 0,730 dan nilai alpha variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,742. Nilai alpha tersebut lebih besar dari nilai alpha minimum yang direkomendasikan, yaitu 0,6. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang mengukur implementasi SAP dan kualitas laporan keuangan dapat dikatakan reliabel atau terpercaya.

Coefficients^a

Model	UC		SC	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.638	1.076		2.451	*.021
Penerapan SAP	*.930	*.027	*.988	33.968	*.000

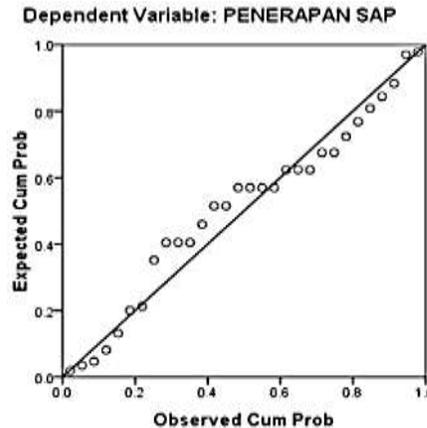
a. Dependent Variable :
kualitas laporan keuangan



Persamaan regresi sederhana dapat dibuat dari hasil regresi yang diperoleh Kualitas Laporan Keuangan = 2.638 + *.930 X. Berdasarkan perhitungan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) sebesar 2.638 yang artinya apabila variabel penerapan sistem akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan publik, maka nilai variabel kualitas pelaporan keuangan sebesar 2.638.

2. Koefisien regresi kualitas pelaporan keuangan pemerintah bernilai positif $*.930$ yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah.



Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,976 atau 97,6%. Artinya, 97,6% variabel kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel penerapan SAP. Sedangkan sisanya (2,4%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SAP memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. T-hitung sebesar 33,968 dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas penerapan SAP terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah bersifat signifikan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,930 menunjukkan bahwa hubungan antara efektivitas penerapan SAP dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah bersifat positif dan kuat.

Efektivitas penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,976 atau 97,6%. Artinya, 97,6% variabel kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel penerapan SAP. Dengan kata lain, semakin baik penerapan SAP, maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara efektivitas penerapan SAP dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, maka semakin baik pula kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan hal yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan tentang pelaporan keuangan. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah standar akuntansi pemerintah (SAP).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tahun 2014 merupakan tahun terakhir di mana pemerintah dapat menggunakan basis kas untuk penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2022, basis akrual wajib digunakan pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penerapan basis akrual pada laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tahun 2022 bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih baik kepada pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi pengungkapan penuh, yaitu pelaporan semua informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung memiliki dampak yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,976 menunjukkan bahwa SAP dapat menjelaskan 97,6% dari variasi kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini menggunakan 30 pegawai Bagian Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai subyek penelitian. Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas penerapan SAP yang signifikan ($p < 0,05$). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 33,968. Nilai koefisien hasil uji regresi sebesar 0,930 menunjukkan bahwa SAP memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bahtiar Arif. Muchlis. Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriani, N. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(3), 211-224.
- Harahap. Sofyan Syafri. (2006). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, M. (2019). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi SDM Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 9(2), 198-212.
- Kurniawan, A. (2020). Studi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 13(1), 78-92.

- Kurniawati, R. (2020). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 123-135.
- Muindro. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit PT MitraWacana. Jakarta.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi keempat*. Penerbit. Liberty. Yogyakarta.
- Revrisond Baswir. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Rubin, I.M., Kolb, D.A., & Osland, J.S. (1995). *The Organization Behaviour Reader*. 6th Ed. New Jersey: Prantice Hall.
- Rustiarini, Niwayan. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1, hlm. 89-90.
- Sahlan, Asmaun, & Angga Teguh Prasetyo. (2012). *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Arruz Media.
- Sari, Susiana, Sudjana Nengah, & Azizah D.F. (2013). Penerapan Akuntansi Lingkungan untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 2, hlm. 152-161.
- Sarumpaet, Susi. (2016). The manager's decision in acknowledging and disclosing environmental liability: A Behavioral Model. *Journal of Economics, Business & Accountancy*, Vol. 19, hlm. 191-204.
- Sarumpaet, Susi, Nelwan M.L., & Dewi D.N. (2017). The value relevance of environmental performance: evidence from Indonesia. *Social Responsibility Journal*, Vol. 13, hlm. 817-827.
- Sekaran, Uma. (2009). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarno. (2008). Akuntansi Lingkungan Sebagai Alat Manajemen Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 5 No.1, hlm. 92-96.
- Suryanto, Ari Doddy, & Susilowati, Diana. (2005). Kajian Potensi Ekonomis dengan Penerapan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) pada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Depok. *Proceeding Seminar Nasional PESAT*.
- Stainback, Susan, & Stainback, William. (1998). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company. Dubuque, Iowa.
- Stigler, G. (1971). The Theory of Economic Regulation. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 3. Chicago: Rand Corporation.
- Stake, R.E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Tilling, M.V. (2004). Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting. *Commerce Research Paper Series No. 04-06*. Diambil kembali pada 28 Februari 2018.
- Utama, Anak Agung Gde Satia. (2016). Akuntansi Lingkungan Sebagai Suatu Sistem Informasi. Studi pada Perusahaan Gas Negara (PGN). *Departemen Akuntansi Universitas Airlangga. Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6 (1), hlm. 89-100.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.*
- Scott, William R. (2009). *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Pearson Prentice Hall. Toronto.
- Yin, R.K. (1987). *Case Study Research: Design and Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Yulianto, D. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 15(1), 45-58.

